

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG</p>	<p>Available online: at  <a href="https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah">https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah</a>  <b>Hadharah:</b>          Jurnal Keislaman dan Peradaban          ISSN: 0216-5945          DOI:</p>	
--	---	---

---

## **PENERAPAN SYARI'AH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM; ANTARA IDENTITAS DAN REALITA SERTA RESPON DUNIA**

**<sup>1</sup>Fadila Syahadha, <sup>2</sup>Efendi**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
 e-mail: [fadilasyahadha02@gmail.com](mailto:fadilasyahadha02@gmail.com), [efendi@uinib.ac.id](mailto:efendi@uinib.ac.id)

---

### **Abstract**

*Brunei Darussalam is a small country with an area of ± 5,765 km<sup>2</sup> with the capital city Bandar Seri Begawan. The Sultanate of Brunei has been in existence since the 15th century AD, passed down from one sultan to another as head of state and head of government. His Majesty the Sultan is advised by several assemblies in a cabinet of ministers, even though he is actually the controller of the highest government. After Brunei's independence in 1984, Brunei was led by Sultan Hasanul Bolkihah Mu'izzaddin Wadaulah the 19th sultan. Since 1991 the Sultan has implemented MIB (Melayu Islam Beraja or the Malay Islamic Kingdom) as the state ideology, the goal is for the people to be loyal to their king, carry out the teachings and Islamic law and make it a way of life associated with the characteristics and characteristics of the true Malay nation. Brunei Darussalam is a country that is thick with Islamic culture in various aspects, from social, economic, educational, and other aspects. In October 2013 the government of Brunei Darussalam announced the nationalization of Islamic sharia law regardless of religion on May 1, 2014. The Islamic Sharia law applies to anyone without exception and has received several responses from various groups*

**Keywords : Brunei Darussalam, MIB, Ideology, Islamic Law, response**

### **Abstrak**

Brunei Darussalam sebuah negara kecil yang luas wilayahnya ± 5.765 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkihah Mu'izzaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan

ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati. Brunei Darussalam merupakan negara yang kental dengan budaya Islam dalam berbagai aspek, dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada Oktober 2013 pihak pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandang agama pada 1 Mei 2014. Hukum Syariah Islam tersebut berlaku pada siapapun tanpa terkecuali dan menuai beberapa respon dari berbagai kalangan.

**Kata kunci: Brunei Darussalam, MIB, Ideologi, Hukum Islam, respon**

## **PENDAHULUAN**

Negara dengan corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan landasan hukum Islam yakni Sultan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lalu merangkap sebagai Perdana Menteri Pertahanan dengan bantuan Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri adalah Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan dipimpin oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang. Adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam di antaranya; 1) Sulthan Muhammad Syah sultan ke-1 (sebelum masuk Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar). Ia memerintah sejak tahun 1402-1408. pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam 2) Sulthan Bolkiah (1485-1524) sultan ke-5. Pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke kawasan Borneo (Kalimantan) termasuk wilayah kesultanan Sulu (Filipina) 3) Sulthan Abdul Mubin (Momin) sultan ke-12, memerintah tahun 1852-1885. 4) Sulthan Hasanul Bolkiah sultan ke-19 memerintah dari tahun 1968 hingga sekarang. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Brunai sebagai tonggak pemerintahan, yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja).<sup>1</sup>

Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas dua pertiganya etnik Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: pertama, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan kedua Islam sebagai *Form of Fortification*. Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keIslaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu: Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i dari sisi fiqhnya dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Untuk menerapkan Melayu Islam Beraja ini maka pemerintah menunjuk tim untuk menyusun materi

---

<sup>1</sup>Marwati Djuneid & Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 66

secara cermat dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi.

Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati.<sup>2</sup>

Terhitung sejak 1 Mei 2014, Brunei Darussalam mulai menerapkan Hukum Syari'ah Islam secara nasional. Kebijakan ini diumumkan oleh oleh Sultan Hasanul Bolkiah pada Oktober 2013 dalam suatu acara kenegaraan. Kebijakan pemerintah ini mendapat banyak kecaman dari dunia internasional karna terlihat bertentangan dengan HAM namun, Hasanul Bolkiah dengan tegas tetap menjalankan kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

## **METODE**

Sumber yang penulis gunakan dalam tulisan ini ialah dengan menggunakan library research, dimana menggunakan sumber-sumber sekunder dari buku dan sumber berita dari portal berita sezaman. Penjabaran dalam tulisan ini dengan metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis dengan pendekatan politik kesejarahan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tulisan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai.

### **1. Letak Geografis dan Sejarah Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam secara geografis merupakan sebuah negara kecil, terletak di Asia Tenggara dan berposisi di pulau Kalimantan bertepatan dengan pantai Barat Laut Kalimantan. Wilayahnya memang tidak luas yaitu sebesar 5.765 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Bandar Sri Begawan

---

<sup>2</sup>Abd Gofur, *Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam, Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 1, 2015, hal. 55

<sup>3</sup>*Ibid.*

dan menempati posisi 138 di dunia. Negara ini berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya pada bagian Serawak. Meski lokasinya berada di sebelah utara Borneo, namun tidak berbatasan dengan Indonesia.



Laut Cina Selatan yang cukup luas juga melewati negara yang beribukota di Bandar Sri Begawan tersebut. Batas pantai yang dimiliki juga tidak begitu besar karena memang luas negaranya yang cukup kecil. Sebagian wilayahnya berupa dataran rendah dan juga pegunungan berbatasan dengan Serawak di sebelah barat daya, Sabah di sebelah timur laut, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan negara Indonesia.<sup>4</sup>

Brunei Darussalam merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas dua pertiganya etnik Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Warga Brunei beragama Islam 67%, Kristen 10%, Budha 13% dan animisme serta aliran kepercayaan 10%, yang pada umumnya dianut non-Melayu.<sup>5</sup> Ia termasuk dalam negara rumpun melayu. Brunei dianggap sebagai negara tua diantara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua diperoleh berdasarann catatan Arab, China dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah China dikenal dengan nama *Po-li*, *Po-lo*, *Poni* atau *Puni* dan dalam catatan Arab dikenal dengan istilah *Dzabaj* atau *Ranjid*.<sup>6</sup> Brunei zaman dahulu disebut kerajaan Borneo lalu berubah menjadi Brunei.

Nama Borneo ini diduga kuat disandarkan kepada Borneo sebagai nama lain dari pulau Kalimantan karena Brunei terletak di bagian Barat

<sup>4</sup>Flysh Geost, Letak Astronomis, Geografis dan Geologis Brunei Darussalam  
<https://www.geologinesia.com/2018/09/letak-astronomis-geografis-dan-geologis-brunei-darussalam.html>

<sup>5</sup><https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>

<sup>6</sup>Che Ude Che Nik, *Sejarah Islam* 2 Cet. II, (Selangor; Fajar Bakti Sdn Bha, 1981), hal.

Laut Kalimantan. Pendapat lain mengatakan Brunei berasal dari kata *baru nah* yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan Klan atau suku Sakai (serombongan pedagang dari China dari suatu tempat ke tempat yang lain) yang dipimpin oleh Pateh Berbagai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis karena diapit oleh bukit dan air, mudah dikenal untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan mereka mengucapkan perkataan *baru nah* artinya tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati untuk mendirikan negara seperti yang mereka inginkan. Kemudian pencatatan *baru nah* itu lama kelamaan menjadi Brunei.<sup>7</sup>

Naskah Nagarakertagama karya Prapanca mengatakan bahwa Brunei dikenal dengan nama *barune(ng)* yang didukung dengan ditemukannya data yang mengacu kepada penamaan kerajaan Brunei sebelum Islam. Sumber lain juga menyebutkan bahwa asal mula nama Brunei berasal dari bahasa sansekerta "varunai" yang semula diambil dari kata sansekerta *Varunadvipa* yang berarti Pulau Kalimantan yang kemudian setelah disempurnakan ejaannya berganti menjadi Brunei hingga Islam datang menjadi Brunei Darussalam<sup>8</sup> pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei Darussalam diproklamirkan sebagai negara merdeka, bersendikan ajaran-ajaran *ahlu sunnah wal-jama'ah* dan mazhab Syafi'i ditetapkan sebagai mazhab resmi negara dalam perlembagaan negara.

Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa setidaknya pada abad ke-7 atau ke-8 Brunei telah ditemui keberadaannya. Kerajaan ini ditaklukan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 kemudian dijajah lagi oleh Majapahit, lalu Majapahit runtuh Brunei berdiri sendiri bahkan telah menguasai seluruh Filipina dan Pulau Kalimantan. Zaman keemasan ini dicapai pada masa Sultan kelima Bolkuah yang berkuasa pada tahun 1473-1521.<sup>9</sup> Masa selanjutnya datanglah orang Eropa di wilayah ini, dan Inggris sebagai negara kuat menjadikan Brunei sebagai negara jajahan. Ketika tahun 1888 kerajaan Brunei termasuk persemakmuran Inggris. Pada saat yang bersamaan Malaysia juga dikuasai oleh Inggris. Penduduk kedua negara tersebut kemudian bersatu mengadakan perlawanan dan dalam rentang sejarah yang panjang kedua negara tersebut merdeka. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dan waktu itu Brunei dinyatakan

---

<sup>7</sup>Muflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam* Cet. II, (Bandung; Foksmedia, 2005), hal. 246

<sup>8</sup>Muhammad Syamsu, *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*, (Jakarta; Lentera, 1996), hal. 144

<sup>9</sup>Ajij Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam* Cet. I, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 101

bergabung dengan Malaysia. Setelah kemerdekaannya Malaysia belum begitu stabil terutama pada tahun 1960-an karena orang-orang China konflik dengan masyarakat Melayu. Malaysia dan Brunie yang berpenduduk rumpun Melayu berusaha keras mengamankan negaranya, dan ketika keadaan benar-benar aman, Brunei memisahkan diri dari Malaysia.<sup>10</sup>

Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Penduduk Brunei seluruhnya, baik secara kultural maupun psikologis mampu mengatasi keragaman yang ada. keragaman etnik mayoritas warga Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, murut, kedayan, bisayah, dan etnik Melayu lain dari Malaysia dan Indonesia. Kedua, adanya proses birokrasi dalam pembentukan negara modern, dan harus dipahami serta dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, adanya fenomena yang tampak perlunya membangun ideologi nasional dan mengartikulasikannya dalam budaya nasional di tengah-tengah ideologi yang ada di wilayah Asia Tenggara atau belahan dunia lain.

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis, dan hidup bersama. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acaraacara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalender muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

## **2. Pembentukan Kesultanan Brunei Darussalam**

Dalam sejarah diketahui bahwa Brunei dulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang berpusat di Indonesia. Dalam silsilah Raja-Raja Brunei ada dijelaskan bahwa pada zaman dahulu Sultan pertama dari Kesultanan Brunei itu adalah seorang kafir yang bernama Sang Aji. Brunei berada di bawah kerajaan Majapahit di masa kekuasaan

---

<sup>10</sup><http://www.ai-shia.com/htm/id/service/info-Negara-Muslim/Malaysia.html>

<sup>11</sup><http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah.html>

Patih Aria Gajah Mada, tiap-tiap tahun Brunei mengantarkan upeti berpuluh-puluh karung kapur barus dan air pinang muda ke Patih Aria Gajah Mada.<sup>12</sup> Dalam buku Negara Kartagama karangan Paranca pada tahun 1365 M termuat daftar namanama Negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, di antaranya, Baruneng, Saludang, Kutai, Pasir dan Tanjong Puri. Maka nama Barun(eng) yang disebutkan pertama diperkirakan kuat berasal dari perkataan Brunei. Begitu juga berlaku kepada nama Sang Aji Brunei telah berubah menjadi Sang Aji Baruwing seperti yang terdapat dalam silsilah yang berada di Tarakan yang dimiliki oleh Dato Norbeck dan Dato Bayal.<sup>13</sup>

Jelasnya Baruneng yang terdapat dalam buku Negara Kartagama dan Baruwing yang terdapat dalam Raja Sang Aji Baruwing dalam silsilah yang dimiliki Dato Norbeck dan Dato Bayal di Tarakan dapat dipadukan dengan silsilah Raja Sang Aji disebut Baruwing (Brunei) dan daerah taklukan Majapahit disebut di Barun(eng) (Brunei), sebutannya yang berbeda, yaitu Baruwing dan Baruneng tetapi pengertiannya sama yaitu Brunei. Dalam silsilah Sultan-Sultan Brunei yang diterbitkan Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2011 disebutkan bahwa Sang Aji adalah cikal bakal dari kesultanan Brunei, disebutkan bahwa dia sudah lama kawin tetapi belum dianugerahi putra atau putri.

Pada suatu hari beliau berjalan-jalan di kawasan istana dan mendapatkan sebiji telur yang sangat luar biasa besarnya dan dibawanya ke istana. Pada suatu malam telur itu menetas dan mengeluarkan seorang anak laki-laki yang terkenal dengan nama Samar Yang. Semenjak Sang Aji mendapatkan putera maka isteri beliau pun hamil dan melahirkan seorang puteri. Setelah Samar Yang dan puterinya besar mereka pun dinikahkan. Ketika Puteri Sang Aji sedang hamil, saat dia bersama suaminya bersantai di ruang santai istana, dia ingin hendak makan daging tembadau (kerbau liar) yang dilihatnya sedang berjalan perlahan-lahan di kawasan istana itu. Untuk mendapatkan maksud tersebut Samar Yang menyuruh isterinya meminjam bujak (lembing) milik ayahandanya Sang Aji.<sup>14</sup>

Setelah didupatkannya, Samar Yang pun melemparkan bujak tersebut mengenai badan tembadau itu, dan menempel di badan tembadau lalu dia berlari bersama bujak tersebut dengan meninggalkan darah menetes disepanjang perjalanannya. Saat diberitahukan kepada Sang Aji bahwa bujaknya telah dilarikan tembadau, dia sangat berduka

---

<sup>12</sup>Yura Halim dan Jamil Umar, *Sejarah Brunei* (Brunei Press: Kuala Belait, 1958), hal.14

<sup>13</sup>Syamruddin Nasution dan Suhayib, *Sejarah Perkembangan Islam Di Brunai Darussalam*, Journal For Southeast Asian Islamic Studies, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 3

<sup>14</sup>*Ibid.*

cita karena bujak tersebut adalah pusaka turun temurun yang menjadi lambang kebesarannya. Maka Samar Yang meminta izin kepada ayahanda dan isterinya untuk mencari bujak dan sembadau tersebut. Berpedoman kepada bekas kapak atau telapak kaki dan darah yang tercecer dari luka tembadau tersebut Samar Yang terus berjalan menelusuri jejak kaki tembadau itu dan singgah di beberapa buah kampung.<sup>15</sup>

Orang kampung, demi melihat sikap dan ramah tamahnya Samar Yang, yang menggambarkan asal usul keturunannya berasal dari orang baik-baik maka setiap kampung yang disinggahinya memintanya untuk menikah dengan anak gadis penghulu di tempat itu hingga perkawinannya mencapai 13 kali. Karena menurut mereka kawin dengan seorang yang berasal dari keturunan baik-baik adalah suatu kebanggaan kepada mereka sehingga setiap kampung yang disinggahinya dia menikah disitu dan meninggalkan isterinya di tempat masing-masing. Dia terus melanjutkan perjalanan mencari bujak dan tembadau hingga wafat di suatu tempat.

Disebutkan semua isterinya tersebut telah hamil dan melahirkan putera yang masing-masing dinamakan pateh Berbai, Awang Semaun, Pateh Pahit, Pateh Sangkuna, Hapu Awang, Pateh Tuba, Pateh Mambang, Pateh Menggarun, Pateh Laila Langgor, Pateh Malaikai, Demang Lebar Daun, Pateh Sindayong dan Demang Sari. Sepeninggal Samar Yang yang pergi mencari tembadau tersebut, isterinya (puteri Sang Aji) telah melahirkan seorang putera yang diberi nama Awang Alak Betatar. Dia dipelihara oleh kakeknya Sang Aji sehingga dia lebih dikenal sebagai putera Sang Aji dari pada putera ayah ibunya. Dikatakan pada masa kecilnya Awang Alak Betatar sangat cerdas dan sangat lasak. Sehingga anak-anak dari kawan sepermainannya sering mengadu kepada ayah ibu mereka masing-masing mengenai perangai Awang Alak Betatar yang tidak mau dikalahkan. Akhirnya, kawan-kawan sepermainannya menyebut dia sebagai anak ganjil yang tidak berbakat. Karena malu dia menghadap ibunya menanyakan siapa ayahnya yang sebenarnya, ibunya tidak menjawab dan menyerahkan hal itu kepada kakeknya Sang Aji.<sup>16</sup>

Ketika menanyakan perkara itu kepada kakeknya Sang Aji, diterangkan oleh kakeknya bahwa ayahandanya telah pergi mengembara mencari bujak pusaka dan tembadau yang diinginkan oleh ibunya sewaktu hamil dahulu. Mendengar jawaban itu, Awang alak Betatar yang masih di

---

<sup>15</sup>Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Muhd. Jamil Al-Sufri, *Tarsilah Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam* (Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2001), hal. 34

<sup>16</sup>Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, *Rampai Sejarah I: Meniti Sejarah Silam* (Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2015), hal. 24

bawah umur itu meminta izin kepada kakek dan ibunya untuk mengembara mencari ayahandanya, tetapi tidak diizinkan. Setelah umurnya menginjak remaja kegagahan dan keperkasanya telah nampak dalam dirinya barulah dia diizinkan kakeknya berangkat mencari ayahandanya dengan diiringi oleh beberapa orang prajurit yang gagah perkasa. Dalam perjalanan mencari ayahandanya, Awang Alak Betatar juga singgah di tempat-tempat yang disinggahi ayahandanya Samar Yang atau I-Pai Samaring. Dari penduduk tempatan tempat-tempat ayahandanya singgah tersebut Awang Alak Betatar memperoleh berita mengenai cerita ayahandanya.<sup>17</sup>

Untuk meneruskan perjalanannya maka orang-orang yang ada di tempat-tempat yang disinggahinya diajaknya bersama-sama mencari ayahandanya. Akhirnya 14 orang rombongan itu pun sampai ke suatu tempat penghabisan yang dijalani oleh ayahandanya dinamakan "Tibunan" di ulu Sungai Tatau. Setelah jejak Samar Yang gagal ditemukan maka Awang Alak Betatar bermusyawarah dengan adik-adiknya membatalkan niat mereka mencari ayahanda mereka karena penduduk tidak ada yang mengetahuinya. Maka Awang Alak Betatar bertekad hendak pulang ke Brunei dan mengajak adik-adiknya balik bersama-sama. Di Brunei adik-adiknya disediakan rumah tempat kediaman masing-masing. Tidak lama setelah Awang Alak Betatar selamat sampai di Brunei Sang Aji Brunei atau Sang Aji Baruwing mengudurkan diri dari takhta kerajaan dan menyerahkannya kepada cucundanya Awang Alak Betatar. Tatkala Awang Alak Betatar hendak menaiki takhta kerajaan pada tahun 1363-1402 M beliau bermufakat dengan saudara-sudaranya yang 13 orang.<sup>18</sup>

Awang Alak Betatar sebagai anak tertua mendapat sokongan dari adinda-adindanya. Dalam permufakatan antara adik-beradik tersebut dijadikan wasiat yang disampaikan kepada anak cucu mereka supaya senantiasa taat setia kepada Raja dan menjunjung perintah Raja. Pada awalnya pemerintahan Awang Alak Betatar di Brunei masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, tetapi setelah Pateh Aria Gajah Mada yang terkenal gagah perkasa itu meninggal dunia tahun 1368 M maka keadaan itu dijadikan kesempatan bagi Awang Alak Betatar memproklamirkan kemerdekaan Brunei dari kerajaan Majapahit pada tahun 1368 M itu juga. Setelah merdeka dari kekuasaan Majapahit Awang

---

<sup>17</sup>Yura Halim dan Jamil Umar, *Sejarah Brunei* (Brunei Press: Kuala Belait, 1958), hal. 14

<sup>18</sup>Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Muhd. Jamil Al-Sufri, *Tarsilah Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam* (Brunei: Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2001), hal. 49

Alak Betatar memeluk Islam di Johor, juga pada tahun 1368 M itu, kemudian beliau menikah dengan puteri Raja Johor dan berganti nama dengan Sultan Muhammad Shah yang diberikan oleh mertuanya Sultan Johor. Dan menjadi Sultan Islam pertama di Brunei.<sup>19</sup>

Dari fakta sejarah di atas dapat diketahui bahwa terdapat kait mengait antara masa Islamnya Awang Alak Betatar dengan masa meninggalnya Pateh Aria Gajah Mada yaitu 1368 M. Selama Brunei masih berada di bawah kekuasaan Pateh Aria Gajah Mada maka Awang Alak Betatar mengikuti agama yang dianut oleh Raja kerajaan Gajah Mada tersebut. Tetapi setelah Pateh Aria Gajah Mada meninggal 1368 M maka Awang Alak Betatar pun masuk Islam pada tahun yang sama (1368 M) dan menikah dengan puteri Raja Johor kemudian berganti nama dengan Sultan Muhammad Shah. Setelah Sultan Muhammad Shah (Awang Alak Betatar) meninggal, jabatannya digantikan oleh adinda beliau Pateh Berbai sebagai Sultan kedua Brunei Darussalam dan berganti nama dengan Sultan Ahmad Shah (1408-1425 M).<sup>20</sup>

Sultan Ahmad Shah tidak mempunyai putera hanya mempunyai seorang puteri bernama puteri Ratna Kesuma. Sekitar lebih kurang tahun 1400 M seorang ulama Sharif Ali yang berbangsa Arab dari Thaib telah datang ke Brunei untuk menyebarkan agama Islam di Brunei. Memandang jasa dan kearifannya menyebarkan agama Islam, Sultan Ahmad Shah telah memperkenankan Sharif Ali kawin dengan puteri baginda Puteri Ratna Kesuma. Sultan Ahmad Shah meninggal 1425 M karena tidak mempunyai putera, maka Sultan Sharif Ali dijunjung dan didukung oleh para pembesar dan rakyat Brunei untuk diangkat menjadi Sultan Brunei yang ketiga menggantikan Sultan Ahmad Shah.

### **3. Sistem Sosial dan Politik Brunei Darussalam**

#### **a) Sosial**

Negara ini terkenal dengan ketegasannya dalam melaksanakan syari'at Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Demografi Brunei Darussalam di dominasi oleh penduduk asli Melayu asli yang mayoritas beragama Islam. Dilatar belakangi oleh sejarahnya yang dalam waktu yang sangat lama berada dalam kekuasaan seorang sultan beragama Islam hingga sekarang, merupakan sebuah fondasi bahwa Brunei adalah negara yang menjalankan syari'at Islam. Pelaksanaan syari'at Islam dalam proses menciptakan system sosial di Brunei Darussalam salah satunya dengan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran haji Abdurrahman, *Islam di Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam: Dewan bahasa dan Pustaka, 2005), hla. 51

mendirikan lembaga-lembaga modern yang sesuai dengan tuntutan Islam yang terbagi dalam beberapa bidang, yakni pendidikan, budaya, ekonomi dan hukum.<sup>21</sup>

Dalam bidang pendidikan misalnya, Brunei Darussalam mendirikan lembaga-lembaga modern yang sesuai dengan tuntutan Islam yang terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya bidang pendidikan, budaya, ekonomi dan hukum. Dalam bidang pendidikan, penggunaan Bahasa Melayu dan Inggris memiliki penekanan yang sama pada pendidikan dasar. Bedanya penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu), seperti ajaran agama Islam yang merupakan program pengajaran moral inti di sekolah.

Pelajaran satu tahun dalam bidang MIB bahkan diwajibkan untuk tingkatan mahasiswa. Sekolah-sekolah sekunder bahasa Arab juga diajarkan sejak pada tahun 1970, dan bagi siswa yang memenuhi syarat kemudian dikirim ke Al-Azhar University di Kairo dengan biaya penuh dari pihak pemerintah Brunei. Bahkan Brunei sendiri adalah salah satu negara yang memiliki yayasan khusus di Kairo. Hal itu dengan harapan ketika pulang nanti ilmu agama yang diperoleh akan diajarkan untuk kemajuan pendidikan di Brunei. Kemudian pendirian Sekolah Guru Agama Brunei (*Brunei Religious Teachers College*) yang telah didirikan pada tahun 1972, bertujuan melatih dan mempersiapkan guru-guru agama yang terampil dan dapat mencetak generasi muda Brunei yang lebih agamis dimasa mendatang. Pemerintah juga mendirikan sejumlah pusat kajian Islam untuk kepentingan penelitian agama Islam, yakni Institut Al-Qur'an Sultan Haji Hassanal Bolkiah, selain itu ada juga beberapa madrasah yang tidak dibawah naungan kerajaan namun dibawah kendali Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah (YHSHB) yang system pendidikannya lebih memperlihatkan ke-khasan ke Islaman yang sangat kental.<sup>22</sup>

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas perekonomian pemerintah mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang berbasis Islam. masyarakat, maka pemerintah mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang berbasis Islam. Secara historis sejak tahun 1953 Brunei sudah mulai merancang rencana pembangunan nasional lima tahun sebagai langkah awal untuk perubahan bagi Brunei sendiri. Tujuan dari

---

<sup>21</sup><http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-hmalisyams-19311-1-bahanaj-d.pdf.html>

<sup>22</sup>Raghadah Agus. "Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam". The Brunei Times. 11 Oktober 2014, hal. 4

rancangan rencana ini untuk mengangkat Brunei dari status rendah berubah menjadi negara yang berstatus tinggi, memodernisasikan Brunei Darussalam dalam peningkatan standar hidup masyarakatnya sehingga bisa selevel dengan negara-negara lain tanpa melupakan MIB sebagai falsafah negara yang utama. Budaya masyarakat Brunei Darussalam juga sangat kental dan tidak dipisahkan dengan budaya Islam. Diantaranya adalah model dan cara berpakaian, lagu kebangsaan yang berjudul Allah Peliharakan Sultan, dan lambang yang terdapat pada bendera negara yang bertuliskan bahasa arab yaitu *Addaa'imuna al-muhsinuna bil-huda* yang memiliki makna sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah SWT.

Keadaan Brunei Darussalam pada masa Sultan Hassan Al-Bolkiah saat ini, Brunei mencapai zaman keemasan dalam beberapa bidang jika dibandingkan dengan Sultan-Sultan terdahulu. Satuan mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Jumlah produksi minyak mentah dan gas alam hampir setengah Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih dari 90% pendapatan. Pemerintah juga menyediakan semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga Universitas, penataan pemukiman penduduk rapi, Pemerintah menyediakan semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas, penataan pemukiman penduduk hingga terkesan rapi, penyediaan pasokan air, perbaikan metode pertanian dan perikanan, penambahan akses jalan, pembangunan jembatan dan stasiun listrik serta instalasi sistem penyiaran dan telepon. Brunei juga melakukan beberapa upaya dalam hal menunjang pendapatannya, salah satunya adalah memperkuat sektor perbankan, pariwisata, dan terus memperluas basis ekonomi di luar minyak dan gas. Sekitar lebih dari 59,78% anggaran tahunan pemerintah dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan, sedangkan pendidikan menghabiskan sekitar 21,77%.<sup>23</sup>

## **b) Politik**

Brunei memegang kendali pemerintahannya sendiri pada tahun 1959 setelah periode pemerintahan Inggris yang pada saat itu Sultan Omar Ali Saifuddien III diberikan kewenangan eksekutif. Namun dalam hal hubungan politik luar negeri tetap di bawah kendali Inggris, sehingga pencapaian tersebut tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada Sultan Omar Ali Saifuddien III dalam membentuk

---

<sup>23</sup>*Brunei-Anggaran pendapatan dan belanja negara*. [online]. Diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>.

sistem politik dan pemerintahan Brunei Darussalam. Kemudian pada tahun 1962 Brunei Darussalam pernah akan bergabung dengan federasi Malaya (Malaysia), namun karena adanya pemberontakan dari pihak internal yang dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei (PRB) yang tidak setuju akan rencana tersebut dan juga adanya perselisihan pengaturan keuangan dan kesulitan dalam menentukan pemegang kekuasaan tertinggi antara penguasa Melayu akhirnya rencana tersebut gagal.<sup>24</sup>

Berdasarkan perjanjian November 1971 antara Brunei dan Inggris, Brunei memperoleh otonomi internal yang penuh dan tidak lagi menjadi negara yang terus dilindungi Inggris. Namun untuk mempertahankan citra sebagai negara yang bertanggung jawab dalam hal hubungan luar negerinya yang selama ini dikontrol Inggris, akhirnya kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama pada tahun 1979 serta mengakhiri perjanjian 1971. Mereka juga berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan penuh untuk Brunei pada tahun 1984. Kemudian Sultan Brunei menyatakan kemerdekaan politik Brunei dari Inggris pada 1 Januari 1984 secara internasional.

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik pemerintahan monarki absolut. Di bawah konstitusi 1959 Brunei yang merupakan konstitusi warisan Inggris namun masih berlaku dan belum diperbarui hingga 2016, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan diabadikan dalam filosofi nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja hingga 2016, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan diabadikan dalam filosofi nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja Sultan memiliki kekuasaan absolut sebagai raja, kepala negara, kepala agama, kepala Pemerintah, bahkan sebagai kepala pada beberapa kementerian. Brunei Darussalam tidak memiliki dewan legislatif, tetapi pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk pertama kalinya dalam pembentukan dewan legislatif yang tidak pernah diadakan sejak Brunei mendapatkan kemerdekaan secara penuh pada tahun 1984.<sup>25</sup>

Akhirnya Dewan Legislatif terbentuk untuk pertama kalinya yang

---

<sup>24</sup>B. A. Hussainmiya. *Brunei Darussalam: A Nation at Peace*. [Online]. Diakses dari <http://www.niu.edu/cseas/outreach/pdfs/Brunei.pdf>.

<sup>25</sup>*Ibid*

memiliki 36 anggota yang ditunjuk secara langsung oleh Sultan. Dewan Legislatif ini berbeda dengan yang ada pada negara demokratis pada umumnya, di Brunei Dewan Legislatif hanya memiliki tugas konsultatif atau tidak mempunyai kuasa. Maksudnya, dewan Legislatif ini berfungsi untuk memantau dan meninjau semua kebijakan nasional, pelaksanaan dan kinerja mereka kemudian melaporkannya kepada Sultan.<sup>26</sup>

#### 4. Penerapan Hukum Syari'ah di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara yang kental dengan budaya Islam dalam berbagai aspek, dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada Oktober 2013 pihak pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandang agama. Hukum Syariah Islam tersebut berlaku pada siapapun tanpa terkecuali yang diterapkan pada 1 Mei 2014. Menurut Sultan Hassanal Bolkiah nasionalisasi tersebut merupakan pencapaian besar karena dengan kata lain berarti Brunei telah selangkah lebih maju untuk menjadi negara Islam seutuhnya sesuai dengan ajaran Al-Quran.<sup>27</sup>

Aturan dalam penerapan Hukum Syariah Islam tersebut dilakukan secara bertahap dalam 3 tahapan yakni:

**Tahap pertama**, 1 Mei 2014 penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang memuat aturan yang paling ringan jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Secara keseluruhan, tahapan pertama ini memuat 55 aturan umum. Diantaranya adalah: pertama, bagi yang tidak menghormati bulan Ramadhan seperti membuka tempat makan secara terang-terangan pada siang hari. Kedua, bagi laki-laki yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebagaimana perintah Allah dan Rasulullah. Ketiga, menyebarkan agama lain selain Islam. Keempat, hamil diluar nikah bagi para perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya atau dalam keadaan dengan status tidak memiliki suami.

Karena apabila telah memiliki suami, maka masuk dalam tahapan hukum kedua dengan sanksi yang lebih berat. Kelima, mengadakan acara agama lain selain Islam secara terbuka seperti merayakan hari natal. Keenam, menghina fatwa Dewan Agama atau Menteri Agama. Ketujuh, menerbitkan sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam tanpa izin dari pihak Dewan Agama Kerajaan. Tahapan pertama ini memiliki sanksi

---

<sup>26</sup>Naimah S. Talib. 2002. *A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era of Democratic Nation-States*. [Online]. Diakses dari <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS- Dec02/Talib.pdf>.

<sup>27</sup>Tim redaksi BBC. 2014. *Hari Pertama Brunei Terapkan Hukum Syariah*. [online]. Diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501\\_brunei\\_implementasi\\_syariah.html](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501_brunei_implementasi_syariah.html)

hukuman penjara dan denda uang. Waktu dan jumlah dari pembayaran denda tersebut sesuai keputusan hakim tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, namun untuk hukuman penjara pada tahapan pertama ini dibawah 30 tahun. pada tahapan ini yang merupakan tahapan awal dari tiga rangkaian tahapan yang telah ditentukan tidak ada pemberitaan adanya pelanggaran yang tercatat secara resmi dari kejaksaan Brunei Darussalam.<sup>28</sup>

**Tahap kedua**, 1 Mei 2015 penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam dimulai 12 bulan atau setahun setelah tahapan pertama, yaitu pada 1 Mei 2015. Aturan dan sanksi pada tahapan ini sesuai dengan tingkatannya otomatis lebih berat dari pada tahapan pertama. Tahapan kedua memiliki beberapa poin klasifikasi aturan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya adalah: pertama, mencuri. Kedua, minum khamr (minuman keras). Dalam hal ini ada ketentuan perbedaan jumlah mengenai banyaknya minuman keras yang dikonsumsi antara muslim dan non- muslim. Ketiga, melakukan seks atau perzinahan dengan orang lain dalam status masih memiliki suami atau istri. Hal ini berlaku bagi yang tidak beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama Islam masuk dalam tahapan ketiga. Sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran pada tahapan kedua ini adalah potong tangan untuk masalah pencurian, pencambukan atau penjara 30 tahun ditambah pembayaran denda untuk masalah perzinahan dan minum minuman keras tergantung konteks kasus dan keputusan hakim. Pada tahapan kedua diantara tahapan awal dan akhir dari Hukum Syariah Islam yang telah ditetapkan ini sama seperti yang terjadi pada tahapan pertama, yaitu tidak ada pemberitaan pelanggaran yang tercatat secara resmi dari bagian kejaksaan Brunei Darussalam.<sup>29</sup>

**Tahap ketiga**, dimulai pada 1 Mei 2016 tahapan ini merupakan yang terakhir dan berada pada tingkatan tertinggi dengan pelanggaran dan sanksi yang paling berat. Aturan pada tahapan tiga ini beberapa diantaranya adalah: pertama, penistaan agama Islam. Kedua, penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, melakukan seks atau perzinahan dengan orang lain dalam status masih memiliki suami atau istri dan beragama Islam. Keempat, melakukan homoseksual atau lesbi. Kelima, mengaku sebagai Tuhan atau Nabi dan tidak mau mengakui kebenaran hadits yang telah disepakati kebenarannya oleh pihak Dewan

---

<sup>28</sup>Tim redaksi Pelita Brunei. 2014. Allahu Akbar! Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah 2013 Mula Berkuatkuasa. [online]. Diakses dari <http://pelitabrunei.gov.bn/template/irsyad-hukum/item/10514-allahu-akbar-perintah-kanun-hukuman-jenayah-syariah-2013-mula-berkuatkuasa>.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Agama dan Menteri Agama Brunei Darussalam secara mayoritas. Sanksi yang diberlakukan untuk tahapan ketiga ini adalah yang paling berat, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam atau dipancung. Pada tahapan ketiga ini juga tidak jauh dengan dua tahapan sebelumnya, tidak ada pemberitaan pelanggaran hukum secara resmi dari bagian kejaksaan Brunei Darussalam.<sup>30</sup>

Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam sebenarnya bukan hal baru, karena sebelum Sultan Hassanal Bolkiah mengeluarkan pengumuman pada tahun 2013, beberapa poin yang bersifat syariah telah dijalankan di Brunei seperti larangan menjual dan mengkonsumsi khamr (minuman keras). Namun poin-poin hukum tersebut hanya berlaku bagi yang beragama Islam dan tidak bersifat nasional tanpa mempertimbangkan status latar belakang agama. Banyaknya tambahan poin-poin aturan pada pembaharuan hukum Brunei hingga menjadi Hukum Syariah Islam seakan mencerminkan monopoli Islam terhadap hukum nasional Brunei yang komposisi penduduknya tidak seratus persen beragama Islam meskipun pemeluk agama Islam di Brunei adalah mayoritas seperti di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut juga menerapkan hukum syariah Islam namun dalam konteks yang berbeda, tidak diterapkan secara nasional. Konsep yang diterapkan juga tidak sama dengan hukum syariah Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam. Hal tersebut dikarenakan antara ketiga negara yang berpenduduk mayoritas muslim tersebut memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda meskipun sama-sama menggunakan istilah Hukum Syariah Islam.<sup>31</sup>

## 5. Respon Dunia

### a) Lembaga HAM<sup>32</sup>

Penerapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam banyak menuai kontroversi dari berbagai pihak, baik pro ataupun kontra. PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang menaungi banyak lembaga internasional dan beranggotakan lebih dari lima puluh persen negara-negara di dunia, bahkan Brunei Darussalam adalah salah satu negara anggota yang aktif didalamnya dalam rangka usaha pencapaian perdamaian dunia. salah satu lembaga dibawah naungan PBB adalah Komisariat Tinggi HAM PBB yang berstatus sebagai lembaga HAM tertinggi dalam dunia internasional yang juga ikut andil dalam merespon isu penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>A. Intan Cahyani, *Hukum Islam Di Brunei Darussalam*, Jurnal Al-Qada, Vol. 2 No. 2, hal 150

<sup>32</sup><https://www.dw.com/id/aktivis-ham-kecam-hukum-syariah-brunei-terhadap-kaum-lgbt/a-48062428>

tersebut. Melalui juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia *Rupert Colville* dalam konferensi pers pada awal April 2014, PBB dengan tegas mengecam dan menyatakan kecewa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam mengenai penerapan Hukum Syariah Islamnya secara nasional bahkan memerintahkan bagi pihak pemerintahan Brunei Darussalam untuk mengkaji ulang secara objektif atau membatalkan sekalian.

Salah satu poin sanksi yang masuk pada Hukum Syariah Islam yang diterapkan di Brunei disebut-sebut telah melanggar hukum internasional karena tidak sesuai dengan standar nilai hak asasi manusia internasional yang berlaku. Poin sanksi yang dimaksud adalah penetapan hukuman mati dengan cara rajam dan pancung yang masuk dalam tahapan ketiga dari Hukum Syariah Islam Brunei Darussalam. Sanksi berat tersebut disebut sangat bertentangan dengan standar HAM internasional. *Human Rights Watch* (HRW) merupakan lembaga internasional non-pemerintah yang aktif dalam bidang HAM tak kalah juga memberikan perhatian khusus terhadap isu penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Secara tegas direktur HRW Asia Phil Robertson menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Brunei harus dibatalkan. Karena selain tidak sesuai dengan nilai standar HAM internasional, hal tersebut juga merupakan bukti mundurnya lembaga keadilan Brunei secara drastis. Sanksi hukuman mati dengan cara rajam dan pancung menurut HRW adalah cara kuno yang bersifat brutal, tidak berkemanusiaan dan sudah tak layak lagi jika masih digunakan di abad 21 yang sudah serba modern seperti sekarang dimana perkembangan dalam berbagai aspek tidak dapat dihentikan lagi.

#### **b) Kelompok LGBT<sup>33</sup>**

Kecaman tak cukup berhenti pada dua lembaga besar internasional itu saja, kelompok LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transeksual) yang berada di Brunei Darussalam bahkan yang di luar negeri merasa kaum mereka terancam akan mendapatkan sanksi hukuman mati dengan cara hukum rajam atau pancung jika melakukan sodomi sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahapan ketiga dari Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Bentuk protes mereka adalah dengan memboikot hotel di bawah bendera *Dorchester Collection* milik Kesultanan Brunei. Akibat dari ulah kaum LGBT ini pihak hotel ditaksir mengalami kerugian besar.

---

<sup>33</sup><https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47910980>

Boikot tersebut juga diserukan oleh para selebriti Hollywood yang tergabung di dalamnya, salah satunya adalah Stephen Fry yang merupakan aktor ternama di Inggris.

### c) Pengembalian Gelar Kehormatan<sup>34</sup>

Penerapan hukum syari'at dan diberlakukannya undang-undang hukuman mati bagi LGBT dikecam banyak oleh PBB. Protes di beberapa penjuru dunia juga masih berlangsung. Termasuk di depan Dorchester Hotel, London, Inggris, Sabtu lalu. Aksi yang didukung aktivis HAM Peter Tatchell itu juga menyerukan boikot terhadap hotel-hotel yang dimiliki Kerajaan Brunei. Dorchester Hotel adalah salah satunya. Hal itu lantas mendorong berbagai pertikaian dan permasalahan tak terkecuali pengembalian gelar kehormatan yang di dapati Sultan dari Universitas Oxford, London ditinjau dan harus dikembalikan. 120.000 orang menandatangani petisi, menyerukan agar Universitas Oxford segera mencabut gelar yang diberikan kepada Sultan Hassanal Bolkiah. Kelanjutan dari itu Universitas menyurati dan menyatakan agar gelar kehormatan dikembalikan. Sultan pun menanggapi hal tersebut dalam suratnya tanggal 6 Mei 2019 bahwa ia akan mengembalikan gelar kehormatan yang sudah diberikan.

## SIMPULAN

Ideologi negara yang dibangun pemerintahan Brunei, yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: pertama, Islam sebagai Guiding Principle, dan kedua Islam sebagai Form of Fortification. Dua dasar ini kemudian membentengi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar jabarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara.

## REFERENSI

---

<sup>34</sup><https://www.inews.id/news/internasional/sultan-brunei-kembalikan-gelar-kehormatan-oxford-terkait-hukuman-mati-bagigay#:~:text=Hampir%20120.000%20orang%20menandatangani%20petisi,Oxford%20pada%206%20Mei%202019.>

- B. A. Hussainmiya. *Brunei Darussalam: A Nation at Peace*. [Online]. Diakses dari <http://www.niu.edu/cseas/outreach/pdfs/Brunei.pdf>.
- Che Nik Che Ude, 1981, *Sejarah Islam 2* Cet. II, (Selangor; Fajar Bakti Sdn Bha Cahyani A. Intan, *Hukum Islam Di Brunei Darussalam*, Jurnal Al-Qada, Vol. 2 No. 2
- Flysh Geost, Letak Astronomis, Geografis dan Geologis Brunei Darussalam <https://www.geologinesia.com/2018/09/letak-astronomis-geografis-dan-geologis-brunei-darussalam.html>
- Hasbullah Muflich, 2005, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam* Cet. II, Bandung; Foksmidia
- Halim Yuri, dkk., 1958, *Sejarah Brunei*, Brunei Press: Kuala Belait
- Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Muhd. Jamil Al-Sufri, 2001, *Tarsilah Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam* Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
- , 2015, *Rampai Sejarah I: Meniti Sejarah Silam* Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
- Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran haji Abdurrahman, 2005, *Islam di Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam: Dewan bahasa dan Pustaka
- Nasution Syamruddin, dkk., 2018, *Sejarah Perkembangan Islam Di Brunai Darussalam*, Journal For Southeast Asian Islamic Studies, Vol. 14, No. 1
- Naimah S. Talib. 2002. *A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era of Democratic Nation-States*
- Raghadah Agus. "Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam". The Brunei Times. 11 Oktober 2014
- Syamsu Muhammad, 1996, *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*, Jakarta; Lentera
- Thohir Ajid, 2002, *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam* Cet. I, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>
- <http://www.ai-shia.com/htm/id/service/info-Negara-Muslim/Malaysia.html>
- <http://www.kerajaanusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah.html>
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-hmalisyams-19311-1-bahanaj-d.pdf.html>
- Raghadah Agus. "Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam". The Brunei Times. 11 Oktober 2014
- Brunei-Anggaran pendapatan dan belanja negara*. [online]. Diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>.

- [Online]. Diakses dari <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Talib.pdf>.
- Tim redaksi BBC. 2014. *Hari Pertama Brunei Terapkan Hukum Syariah*. [online]. Diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501\\_brunei\\_implementasi\\_syariah.html](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501_brunei_implementasi_syariah.html)
- Tim redaksi Pelita Brunei. 2014. Allahu Akbar! Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah 2013 Mula Berkuatkuasa. [online]. Diakses dari <http://pelitabrunei.gov.bn/template/irsyad-hukum/item/10514-allahu-akbar-perintah-kanun-hukuman-jenayah-syariah-2013-mula-berkuatkuasa>
- <https://www.dw.com/id/aktivis-ham-kecam-hukum-syariah-brunei-terhadap-kaum-lgbt/a-48062428>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47910980>
- <https://www.inews.id/news/internasional/sultan-brunei-kembalikan-gelar-kehormatan-oxford-terkait-hukuman-mati-bagigay#:~:text=Hampir%20120.000%20orang%20menandatangani%20petisi,Oxford%20pada%206%20Mei%202019>.